

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

PERKEMBANGAN INFLASI

- Angka **inflasi tahunan** Provinsi Papua Barat Daya pada **triwulan III** (Jul – Sep) berturut-turut sebesar **1,77 %, 1,66 % dan 2,59 % (yoy)**.
- Untuk angka **inflasi bulanan** Provinsi Papua Barat Daya pada **triwulan III** (Jul – Sep) berturut-turut sebesar **0,25 %, -0,05 % dan 0,47 % (mtm)**.
- **Penyumbang utama inflasi September 2024** secara **m-to-m** di Provinsi Papua Barat Daya adalah kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil 0,48%.
- **Penyumbang utama inflasi September 2024** secara **y-on-y** di Provinsi Papua Barat Daya adalah kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil 2,09%.

PERKEMBANGAN HARGA BAPOKTING

- Harga Beras Medium rata-rata pada triwulan III sebesar Rp. 15.750/kg. Harga tersebut mengalami **penurunan** sebesar 0,87% dibandingkan harga pada periode triwulan sebelumnya. Begitu pula dengan harga cabai rawit merah yang mengalami **penurunan** sebesar 8,76% dari harga rata-rata pada triwulan II Rp. 71.759/kg menjadi Rp. 65.476/kg pada triwulan III.
- Komoditas yang mengalami persentase kenaikan harga terbesar adalah **Kangkung**, yakni mengalami kenaikan sebesar 25% dari harga Rp. 10.000/ikat menjadi Rp. 12.500/ikat pada triwulan III.
- Lima komoditas yang mengalami fluktuasi harga selama periode III 2024 lebih lengkapnya tersaji pada tabel di bawah:

Komoditas	TWII	TWIII	Keterangan	Persentase Perubahan
Kangkung	10000	12500	Naik	25,00%
Kacang Panjang	15000	17500	Naik	16,67%
Tahu Putih	13333	15000	Naik	12,50%
Cabai Rawit Hijau	45694	50417	Naik	10,34%
Ikan Kembung	40000	44127	Naik	10,32%

RESIKO KE DEPAN

- Ke depan dikhawatirkan harga beberapa komoditas pertanian seperti sayuran akan mengalami kenaikan dikarenakan adanya potensi kekeringan di wilayah sentra produksi di wilayah Papua Barat Daya, namun langkah mitigasi telah dikoordinasikan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dalam percepatan penyediaan tandon air.
- Kenaikan harga tanaman hortikultura masih akan terjadi seiring dengan berkurangnya pengiriman stok dari wilayah asal terkait kondisi iklim

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Permasalahan Ketersediaan Pasokan pangan, sepanjang periode III yakni terkait kenaikan harga cabai rawit hijau. Hal tersebut dikarenakan pasokan cabai rawit hijau masih tergantung kepada daerah pemasok dari luar daerah Provinsi Papua Barat Daya dan tingginya angka konsumsi cabai rawit hijau di Provinsi Papua Barat Daya terlihat dari tingginya konsumsi gorengan di masyarakat.

Dalam menjaga inflasi agar terkendali, maka diperlukan beberapa kebijakan terkait gerakan menanam dengan pemanfaatan lahan tidur.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pengendalian inflasi, maka direkomendasikan beberapa kegiatan seperti:

1. Penyiapan lahan untuk Gerakan Menanam
2. Operasi Pasar Murah
3. Sidak ke Pasar dan Distributor
4. Perbaikan terminal angkutan demi menjaga kelancaran distribusi hasil pertanian

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan kebijakan pengendalian inflasi pada triwulan III yang telah terlaksana, maka perlu dilakukan evaluasi pasca kegiatan agar dapat mengukur ketepatan dan keberhasilan suatu kegiatan. Adapun hasil evaluasinya adalah sebagai berikut:

1. Perlunya koordinasi dalam penyelarasan Roadmap Pengendalian Inflasi di tingkat provinsi dengan Roadmap pengendalian inflasi di kabupaten/kota agar program yang telah direncanakan di tingkat provinsi dapat terlaksana dengan baik di daerah kab/kota
2. Perlunya mendorong kab/kota agar segera menyusun neraca pangan wilayahnya agar provinsi dapat memetakan wilayah surplus dan defisit pangan tiap daerah

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan evaluasi kebijakan pengendalian inflasi pada triwulan III tersebut, maka diberikan rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. Mendorong kab/kota untuk segera menyusun dan/atau menyelaraskan dokumen Roadmap Pengendalian Inflasi tingkat kab/kota dengan dokumen Roadmap Pengendalian Inflasi tingkat provinsi
2. Mendorong kab/kota untuk segera menyiapkan data stok pertanian dan pangan kemudian menyusun neraca pangan wilayah tingkat kab/kota